



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Syahrul**, Jabatan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2019

Menyaksikan :

Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Harlina Sulistyorini,

Pembuat Pernyataan

Syahrul



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harlina Sulistyorini
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Harlina Sulistyorini

Pihak Pertama,

Syahrul

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dan Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	100
		Nilai SAKIP	76
		Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan	100 %
		Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	16 %
		Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP	90
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP	88
		Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP	94 %
		Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP	3 (Kali)
		Tingkat Kepuasan Aparatur Lingkup Ditjen PKP atas Pelayanan Teknis dan Dukungan Manajemen	5 (Sangat Memuaskan)

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Anggaran

Rp 52.000.000.000
(Lima Puluh Dua Milyar Rupiah)

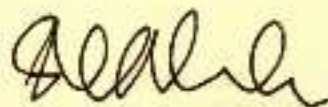
Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,



Harlina Sulistyorini

Pihak Pertama,



Syahrul



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dudi Nugroho**, Jabatan Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta,

Februari 2019

Menyaksikan :

**Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan**



Syahrul

Pembuat Pernyataan



Dudi Nugroho



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dudi Nugroho
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik selama 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Syahrul

Pihak Pertama,

Dudi Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Perencanaan yang baik dilingkungan Ditjen PKP	Jumlah Rumusan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	4 (Laporan)
		Jumlah Rumusan Laporan Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1 (Dokumen)
		Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Rencana Kerja Anggaran di lingkungan Ditjen PKP yang ditindaklanjuti	94 %
		Rata-rata Revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP	3 (Kali)
		Persentase Data Perencanaan yang dimanfaatkan	100 %

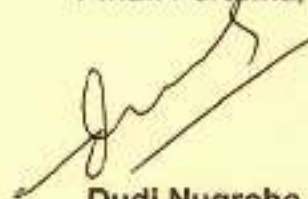
Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,



Syahrul

Pihak Pertama,



Dudi Nugroho



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Iswidiarman Angga Krislianto**, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2019

Menyaksikan :

**Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan**

Dudi Nugroho

Pembuat Pernyataan

Iswidiarman Angga Krislianto



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iswidiarman Angga Krislianto
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dudi Nugroho
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik selama 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Dudi Nugroho

Pihak Pertama,

Iswidiarman Angga Krislianto

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Layanan Penyusunan Program dan Anggaran yang baik dilingkungan Ditjen PKP	Persentase RKA di lingkungan Ditjen PKP yang sesuai dengan hasil rekomendasi penelitian	94 %
		Jumlah dokumen revisi DIPA yang disusun	3 (Kali)

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,


Dudi Nugroho

Pihak Pertama,


Iswidiarman Angga Krislianto



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dwi Cahyo Bani Gunardi**, Jabatan Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2019

Menyaksikan :

**Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan**

Dudi Nugroho

Pembuat Pernyataan

Dwi Cahyo Bani Gunardi



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Cahyo Bani Gunardi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Data Dan Informasi Bagian Perencanaan Sekretariat
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dudi Nugroho
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik selama 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Dudi Nugroho

Pihak Pertama,

Dwi Cahyo Bani Gunardi

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi yang baik dilingkungan Ditjen PKP	Jumlah Data dan Informasi yang dikelola dan dipublikasikan	5 Dokumen


Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,



Dudi Nugroho

Pihak Pertama,



Dwi Cahyo Bani Gunardi



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Faizuddaroin**, Jabatan Analis Pemerintahan pada Sub Bagian Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2019

Menyaksikan :

**Kepala Sub Bagian Data dan Informasi,
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Dwi Cahyo Bani Gunardi

Pembuat Pernyataan

Faizuddaroin